



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PT. PARA MULTIFINANCE
CABANG TEGAL**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

RICKA MOURISES, SH

NIM : B4B001181

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PT. PARA MULTIFINANCE
CABANG TEGAL**

Disusun oleh
Ricka Mourises, SH
NIM : B4B001181

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Ketua Program

Dosen Pembimbing,

Prof. IGN. Sugangga, SH

R. Suharto, SH. M.Hum

TESIS

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PT. PARA MULTIFINANCE
CABANG TEGAL**

Disusun oleh
Ricka Mourises, SH
NIM : B4B001181

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

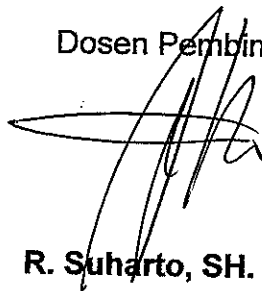
Menyetujui

Ketua Program



Prof. IGN. Sugangga, SH

Dosen Pembimbing,



R. Suharto, SH. M.Hum

ABSTRACTION

Consumer financing is and alternative of financing as done by bank through credit or other kind of loan. In this case PT Para Multi Finance cabang Tegal does not provide any loan to the consumers but through providing finance on capital good, such as motor cycle which is guaranteed on a fiducia warranty.

Two problem was discusses, namely; how is the responsibility of consumer and PT Para Multi Finance cabang Tegal in practice ?, Did the Para Multi Finance cabang Tegal litigate the consumer who breach the contract in order to solve the problem ? and what attitude should be taken when there are difference sittuation related to the confiscation against the object of waranty ?

The research taken place in Tegal city, in thgis research Empirical legal approach is used, and for analisys used descriptive qualitative method Based on the research result found :

1. The contract of Consumer financing obliged the parties to carry on anything which was agreed by them and cited on the contract
2. The consumer was breaching the contract when he/she failed to apply the contract

In order to cover the financial loss PT Para Multi Finance cabang Tegal, confiscated the waranty object. The confiscation done did not base on the article 181 HIR. The reasons why confiscation did not through the court are : more expensive, took longer time to solve the problem and because the way for running of confiscation already regulated in the contract.

ABSTRAKSI

Pembiayaan Konsumen merupakan alternatif pembiayaan seperti halnya peminjaman uang lewat kredit bank atau cara pembiayaan lainnya. Tetapi dalam hal ini PT. Para Multifinance Cabang Tegal tidak meminjamkan uangnya kepada konsumen melainkan melalui Pembiayaan atas barang modal yang berupa kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan jaminan Fidusia.

Studi ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanakah tanggung jawab Pihak Konsumen dan pihak PT. Para Multifinance cabang Tegal dalam praktek Perjanjian Pembiayaan Konsumen? (2) upaya hukum apakah yang dapat ditempuh pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal apabila didalam Prakteknya pihak konsumen melakukan wanprestasi ? serta bagaimana menyikapi perbeclaan dalam hal penyitaan barang yang dijadikan objek jaminan ?

Studi ini dilakukan di kota Tegal, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil studi dapat diketahui bahwa (1) perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan menggunakan jaminan fidusia antara PT. Para Multifinance dan konsumen menimbulkan suatu tanggung jawab, dimana masingmasing pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan terutama pihak konsumen yang mendapatkan fasilitas pembiayaan. (2) Tidak diipenuhinya prestasi oleh konsumen maka konsumen dapat dinyatakan Wanprestasi, pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal tidak melakukan sita terhadap barang jaminan tanpa harus melalui sita pengadilan,. Walaupun sebenarnya hal itu bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 181 HIR tetapi pihak Perusahaan memiliki alasan yaitu sita barang jaminan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar dan dan sebelumnya hal itu telah diperjanjikan didalam kontrak perjanjian Pembiayaan Konsumen antara para pihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya sehingga tesis dengan judul "Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal" akhirnya dapat diselesaikan.

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang terjadinya Wanprestasi pada perjanjian Sewa Guna Usaha serta upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Para Multifinance cabang Tegal apabila konsumennya melakukan Wanprestasi. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Dengan penuh rasa hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. **Bapak Prof. IGN Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Bapak R. Suharto, SH, M.Hum** selaku Sektretaris Program Studi Magister kenotariatan dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan tesis ini.
3. **Bapak Ulistyanto dan Seluruh Staff PT. Para Multifinance Cabang Tegal** atas bantuannya dalam melaksanakan riset dan memperoleh data-data dalam penelitian.

4. Keluargaku ; ***yang tercinta Mama & Papa, Ibu, Mama Adibah & Papa Muslih, serta adik-adikku tersayang ; Reny, Ocie & Anto, Wahyu, dan Agil*** terimakasih untuk semua nasehat, kesabaran dan untaian do'a yang tidak pernah terputus untuk setiap langkahku.
5. ***Suamiku tersayang*** yang telah memberikan dukungan moril dan materil, dan kritiknya yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. ***Mas Hary & Indah, Mbak Titin, Lili, Ade, Farha & Nina*** atas semua kebaikan, perhatian yang tulus dan persahabatan yang penuh warna.
7. Rekan-rekan Angkatan '01 dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga apa yang telah penulis susun ini dapat memberi makna akademis kepada siapapun yang membacanya.

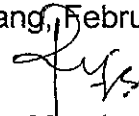
Semarang, Januari 2004

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Februari 2004



Ricka Mourises, SH



Untuk Orang-orang yang aku sayangi

*Demi Matahari dan Cahanya di pagi hari
dan Bulan apabila mengiringinya
dan siang apabila menampakkannya
dan malam apabila menutupinya
dan langit serta pembinaannya
dan jiwa serta penyempurnaannya
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
Jalan kefasikan dan ketakwaannya
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
dan merugilah orang yang mengotorinya"*

(Ds. Asy Syams)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	10
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	10
2. Macam-macam Kredit / Pembiayaan	11
3. Kedudukan Para Pihak	12
4. Dokumentasi	14
B. Tinjauan Umum Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	18

3. Jenis-jenis Perjanjian	25
4. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian	27
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen	31
1. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen	31
2. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Populasi Dan teknik Sampling	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisa Data	38
F. Teknik Pengecekan Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal	40
B. Tanggung Jawab Konsumen dan PT. Para Multifinance Cabang Tegal Terhadap Obyek Pembiayaan Konsumen	60
C. Upaya Hukum Yang Ditempuh PT. Para Multifinance Cabang Tegal apabila Konsumen Wanprestasi	67
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang saat ini tengah dilaksanakan adalah merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu titik berat dari pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan di bidang ekonomi maupun sosial.

Keberhasilan pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha sebagai salah satu anggota masyarakat. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat,

khususnya pengusaha ini memerlukan modal atau dana yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah mencoba mencari jalan keluarnya dengan menawarkan alternatif baru untuk memenuhi kekurangan modal bagi para pengusaha dengan memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank yang sudah ada sebelumnya.

Pemerintah menyadari dana masyarakat yang dihimpun melalui lembaga perbankan tidak cukup guna membiayai pembangunan, sehingga dibutuhkan wadah diluar perbankan yang memungkinkan terhimpunnya dana masyarakat yang lebih besar, lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana seperti dalam bentuk pembiayaan konsumen, *factoring*, modal ventura dan sebagainya.

Setelah munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan itu maka seperti biasanya sektor hukum pun harus mempersiapkan dan menyediakan perangkat hukumnya berupa peraturan-peraturan kebidang baru tersebut, sehingga muncul peraturan hukum yang kita kenal dengan hukum pembiayaan konsumen.

Dalam hukum pembiayaan di Indonesia kita jumpai bermacam-macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan yang relatif baru bagi dunia usaha di Indonesia mempunyai

harapan untuk lebih berkembang dan tumbuh sesuai arah perekonomian masa kini. Oleh Munir Fuadi, SH.MH,LL.M¹ dikatakan bahwa pembiayaan konsumen mempunyai dasar hukum untuk berlaku di Indonesia, yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdota yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Selain itu terdapat pula terdapat pula berbagai dasar hukum lain yang lebih bersifat administratif, yaitu :

Dengan dikeluarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang "Lembaga Pembiayaan", yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang "Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan". Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut "Pembiayaan Konsumen".

Usaha pembiayaan konsumen di Indonesia belum diatur dalam undang-undang yang khusus. Pengaturan mengenai pembiayaan konsumen

¹ Munir Fuadi S.H., M.H, LL.M, Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Citra Aditya bakti, bandung, 5, Halaman 6.

masih dalam tingkat Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen sebagai kegiatan usaha harus mendapat ijin usaha terlebih dahulu dari Menkeu.

Pada umumnya perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia merupakan lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh perusahaan swasta nasional maupun perusahaan patungan Indonesia dengan asing. Dalam SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, ditetapkan bahwa khusus di bidang permodalan swasta nasional dan koperasi wajib setor modal minimal 3 Milyar rupiah, sedangkan untuk perusahaan patungan Indonesia dengan asing wajib setor modal minimal 10 milyar rupiah.

Dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu :

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Berdasarkan pasal ini, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal itu, maka banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang membuat perjanjian pembiayaan konsumen secara notariil².

Pembiayaan konsumen termasuk bisnis yang *loosely regulated* dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian.

Pada penelitian pendahuluan di PT. Para Multifinance Cabang Tegal³ yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen kendaraan sering terjadi peristiwa Wanprestasi dari 1.924 orang konsumen yaitu kira-kira 180 orang yang mengalami wanprestasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, wanprestasi yang dimaksud di sini adalah di mana pihak konsumen tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang. Hal tersebut menarik untuk diteliti, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen, hambatan yang biasa timbul sering kali disebabkan oleh Wanprestasi dari pihak konsumen, misalnya dalam hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban konsumen dalam perjanjian. Pelanggaran perjanjian

² Edy P. Soekardi, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 153

³ Ulistyanto, Hasil wawancara pra survey Kepala Cabang PT. Para Multifinance Tegal, tanggal 15 September 2003

yang berupa wanprestasi dari pihak konsumen tersebut bisa merugikan pihak perusahaan pembiayaan, terutama apabila berpengaruh langsung terhadap obyek pembiayaan konsumen. Untuk itu perlu diupayakan perlindungan hukum terhadap kepentingan perusahaan pembiayaan agar terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan obyek pembiayaan *konsumen*, karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian para pihak tidak boleh dirugikan.

Di dalam isi syarat-syarat perjanjian pembiayaan Nomor 10 huruf h milik PT. Para Multifinance Cabang Tegal dikatakan bahwa apabila konsumen tidak melunasi hutangnya baik untuk 1 (satu) unit kendaraan atau lebih, atau tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan syarat-syarat perjanjian maka untuk itu diberlakukan cedera janji sehingga tanpa pengadilan terlebih dahulu pihak PT. Para Multifinance berhak mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan itu berada dan membebankan biaya penarikan kepada konsumen.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 HIR dimana sita terhadap suatu obyek perjanjian seharusnya dilakukan melalui sita oleh pengadilan.

B. PERMASALAHAN

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen sering terjadi peristiwa cidera janji, dimana pihak *konsumen* melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, resiko dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut adalah penarikan kembali obyek pembiayaan konsumen.

Cara penarikan obyek pembiayaan konsumen dalam prakteknya sering tidak melalui sita pengadilan, maka perlu diadakan penelitian dengan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab konsumen dan perusahaan pembiayaan terhadap obyek pembiayaan konsumen dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal?
2. Upaya hukum Apakah yang dapat ditempuh pihak perusahaan pembiayaan apabila didalam prakteknya pihak konsumen melakukan wanprestasi, serta bagaimana menyikapi perbedaan antara praktek dan ketentuan dalam hal penyitaan obyek pembiayaan konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak *konsumen* dan perusahaan pembiayaan terhadap obyek pembiayaan konsumen dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal apabila pihak perusahaan pembiayaan melakukan Wanprestasi serta bagaimana menyikapi perbedaan antara praktek dan ketentuan dalam hal penyitaan obyek pembiayaan konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna dan melengkapi perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya dibidang perikatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi serta dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan tesis dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Tesis ini terdiri atas lima bab dimana pada masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bagian ini akan menguraikan secara garis besar hal-hal yang akan dibahas dalam tesis ini.

Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai isi tesis ini akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam sistematika penulisan.

- Bab II Bab ini berisikan tentang tinjauan pembiayaan konsumen secara umum, tinjauan perjanjian pada umumnya, perjanjian pembiayaan konsumen dan pengertian wanprestasi.
- Bab III Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data
- Bab IV Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan melalui studi pustaka maupun praktek di lapangan. Dari hasil penelitian ini akan dapat diketahui bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT Para Multifinance Cabang Tegal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pihak konsumen melakukan wanprestasi.
- Bab V Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan yang disarikan dari hasil analisis berdasarkan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, di samping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*". Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja jika kredit konsumsi diberikan oleh bank sementara pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Menurut A. Abdurrahman pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen¹, yaitu :

"kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi".

¹ A. Abdurrahman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hal 242

Keputusan MenKeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Kredit konsumsi pemberi kreditnya adalah pihak bank, sementara pembiayaan konsumen yang menjadi pemberi kreditnya adalah perusahaan pembiayaan.

2. Macam-macam Kredit / Pembiayaan

Kredit sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam kelompok yaitu,

a. Loan Credit

Adalah pemberian kredit dimana nasabah akan menerima uang cash dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara cash juga dikemudian hari.

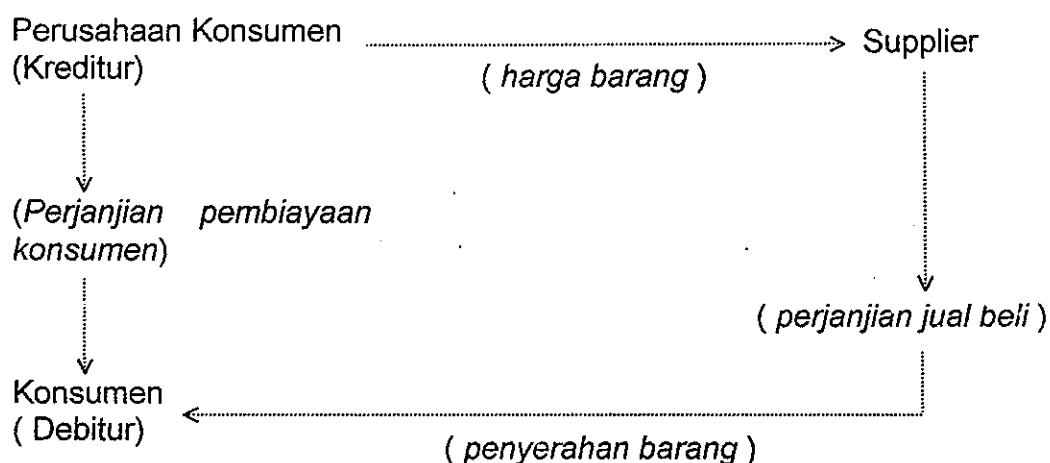
b. Sale Credit

Adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan konsumen akan menerima barang tersebut, dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong kedalam *sale credit*, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

3. Kedudukan Para Pihak

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN



1) Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk membeli sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga

ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (yang terdapat dalam KUHPerdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku karena pihak pemberi pembiayaan bukan pihak bank sehingga tidak tunduk pada peraturan perbankan.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut adalah setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen walaupun kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian Fidusia.

2) Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual-beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier menjual barang kepada konsumen dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti apabila pihak pemberi dana tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dan konsumen akan batal.

3) Hubungan Penyedia dana dengan Supplier

Antara kedua pihak ini sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana.

4. Dokumentasi

Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen ada beberapa dokumen yang diperlukan, dokumen-dokumen itu sangat bervariasi tergantung kepada jenis barang yang dibiayai dan kepercayaan kreditur terhadap konsumen. Ada enam (6) kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yaitu :

1) Dokumen pendahuluan

Yang termasuk didalam dokumen pendahuluan adalah : *Credit Application Form, Surveyor Report, Credit Approval Memorandum.*

2) Dokumen pokok

Yang dimaksud dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen, yang mana perjanjian tersebut mempunyai *terms and conditions* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

3) Dokumen jaminan

Yang termasuk kelompok dokumen jaminan adalah perjanjian fidusia, Cessie asuransi, kuasa menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan pengakuan hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/rapat umum pemegang saham.

4) Dokumen Kepemilikan Barang

Di samping itu ada juga dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB fotocopy, STNK dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan dan sebagainya.

5) Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery order* dan lain-lain.

6) Supporting dokumen

Berisikan dokumen-dokumen pendukung, yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy KK, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani NPWP, SIUP, dan TDP, Bank Statments dan sebagainya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok

² Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1985, hal. 1

dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti pemberian kredit, asuransi, dan jual-beli barang.³

Pasal 1313 KUHPdt memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas, sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan, untuk itu maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian Rutten dalam buku Purwahid Patrik merumuskannya sebagai berikut⁴ :

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik

³ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986, hal 15

⁴ Purwahid Patrik, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Semarang : Seksi Hukum Perdata FH UNDIP, 1996, hal 47-49

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat secara tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.⁵

KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah :

a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁶

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, di sini yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh

⁵ *Loc. Cit*

⁶ Subekti, *Op.Cit*, hal 17

pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah macam atau jenis benda dalam perjanjian paling sedikit harus sudah ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu perjanjian harus mempunyai sebab tanpa syarat ini perjanjian batal dan sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian. Perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Selanjutnya terdapat asas-asas dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asas-asas tersebut adalah⁷ :

a. Asas kebebasan berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur ataupun belum diatur dalam undang-undang. Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan berkontrak, oleh karena itu disebut juga menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang

⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjiannya, Yogyakarta : Liberty, 1985, hal 18-24

berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Sedangkan menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang dalam kenyataannya tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan melindungi pihak yang lemah.⁸

b. Asas itikad baik

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut sistem *common law*.

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank, Jakarta : IBI, 1993, hal 17

dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁹

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standard keadilan atau kepatutan masyarakat.¹⁰

Asas itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.

Istilah itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian terdapat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi :

"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik.¹¹

Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering to goeder trouw*) dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata

⁹ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*, dikutip dari James Gordley, "Good Faith in Contract Law in the Medieval *Ius Commune*", Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, eds., *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), hal. 94

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 138 dikutip dari James Gordley, *Op. Cit.*, hal. 130

¹¹ Perkembangan Hukum Tentang Itikad baik di Nederland, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hal. 8

(Pasal 1374 ayat (3) BW lama Belanda) masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Itikad baik bermakna kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa kiat-kiat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga melihat kepentingan pihak lain.¹²

Asas yang dikutip oleh Purwahid Patrik menyatakan bahwa *bona fides* adalah merupakan kerangka yuridis dari kepatutan selanjutnya ia mengatakan bahwa kekacauan terjadi karena kepatutan *in abstracto* menurut sifatnya adalah sesuatu yang obyektif, sedangkan *bonafides* (itikad baik) dalam arti yang sebenarnya terletak pada jiwa manusia.¹³

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan itikad baik sebagai "niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat adalah sesuatu yang ada di dalam batin seseorang dan memang sesuatu yang abstrak."¹⁴

¹² PI Wery, Op. Cit., hal. 8-9

¹³ Purwahid Patrik, Asas itikad baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986), hal. 17

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hal. 121

Itikad baik dalam perjanjian dapat diartikan bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan, dalam hal ini itikad baik mempunyai beberapa fungsi¹⁵, yaitu :

1. Seluruh perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik

Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak.¹⁶

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak, oleh karena itu jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

2. Fungsi menambah

Bahwa itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

3. Fungsi membatasi dan meniadakan

Bahwa dalam suatu perjanjian tertentu atau syarat dalam suatu perjanjian atau pun suatu ketentuan perundang-undangan

¹⁵ *ibid*, hal. 9-11

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 217, dikutip dari Jhon L. Diamont, et.al. "Good Faith", www.2tto.ttu.edu/cohran/cases/20reading.business/20tort/good_faith_fair_dealing.htm

mengenai perjanjian tersebut, dapat dikesampingkan apabila sejak membuat perjanjian keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan menurut apa yang tertulis dalam perjanjian atau dalam undang-undang dianggap tidak adil. Jadi dalam situasi tersebut kewajiban-kewajiban kontraktuil dapat dibatasi, malah dapat ditiadakan seluruhnya, atas dasar itikad baik.

Pada perkembangan selanjutnya itikad baik tidak hanya berkenaan dengan hubungan kontraktual saja, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan non kontraktual. *Hoge Raad* pada akhirnya menganggap itikad baik sebagai suatu asas hukum umum yang menguasai semua hubungan hukum.¹⁷

Berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*) maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian yang perlu diperhatikan ialah bahwa risiko dibagi dua antara kedua belah pihak, kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis amat berat bagi debitur untuk memenuhi perjanjiannya kita lalu berhadapan dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Di sini kita tetap membedakan antara berubahnya keadaan karena keadaan memaksa dan karena keadaan biasa. Dengan demikian dapat dicegah suatu perbuatan sewenang-wenang dari debitur yang secara gegabah selalu mengemukakan adanya keadaan memaksa dalam setiap peristiwa perubahan

¹⁷ P.L. Wery, *Op. Cit.*, hal. 15

keadaan. Menurut De Wolf Perbedaan antara keadaan memaksa dan peristiwa perubahan keadaan terletak dalam kenyataan bahwa pada keadaan memaksa keadaan yang berubah itu membuat tidak mungkin atau terhalangnya pemenuhan prestasi oleh debitur sedangkan pada peristiwa perubahan keadaan, berubahnya keadaan itu menimbulkan keberatan dari debitur untuk memenuhi prestasi.

Dalam hal perubahan keadaan, Lavenbach menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan keadaan perlu diperhatikan adanya pembagian risiko antara para pihak terhadap suatu kerugian, adalah patut kiranya bahwa debitur mengganti sebagian selisih harga karena perubahan harga, sebagaimana diketahui pemikiran ketegangan dari *ekonomies synallagma* ini adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari suatu alasan bahwa debitur harus memikul juga ketegangan yang penting itu, karena pada waktu menutup perjanjian ia harus menanggung risiko juga di kemudian hari dari suatu nilai apa yang ia beri dan ia terima. Oleh karena itu apabila terjadi kerugian yang besar karena keadaan luar biasa yang sesungguhnya tidak dapat dipersalahkan kepada kedua belah pihak, maka selisih harga itu perlu dibagi dua.

c. Asas pacta sunt servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara

sah oleh para pihak berlaku mengikat bagi mereka seperti Undang-Undang. Tujuan asas ini menurut Subekti adalah :

"Untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya"

d. Asas konsensuil

Maksud dari asas ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, ada beberapa cara untuk mengadakan pembedaan jenis-jenis perjanjian menurut Vollmar dalam buku Purwahid Patrik, perjanjian dapat dibedakan menjadi :

a. Perjanjian timbal-balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, seperti jual beli, sewa menyewa, penjual harus menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga dari barang itu, yang

menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan, penyewa membayar harga sewanya. Prestasi kedua belah pihak kira-kira adalah seimbang.

Perjanjian timbal balik tidak sempurna (Perjanjian dua pihak secara kebetulan) dimana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang.

Dalam perjanjian sepihak hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok.

b. Perjanjian cuma-cuma dan dengan alas hak yang membebani

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain, kedua prestasi itu adalah saling berhubungan.

Kontraprestasinya dapat berupa suatu kewajiban dari pihak lainnya, tetapi juga pemenuhan suatu syarat yang potestatif.¹⁸

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian dimana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan.

¹⁸ Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian B, (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata UGM, 1980), hal. 4

c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik (*Hak Eigendom*) dalam perjanjian jual beli. Perjanjian ini sebagai pelaksana perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak¹⁹, Perjanjian obligatoir mengikat untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pada perjanjian kebendaan adanya penyerahan benda kepada pemiliknya.

d. Perjanjian konsensuil dan riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang.

4. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Adanya kemungkinan suatu perjanjian yang telah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan :

a. *Force majeure*

Suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1990), hal. 87

tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk disebut sebagai *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa"²⁰.

b. Wanprestasi

Dalam Hukum Perdata adanya kelalaian atau kealpaan si berhutang yang wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi menepati kewajibannya yang telah diperjanjikan lazim dikatakan sebagai Wanprestasi. Dewasa ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah²¹ "tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan".

Wanprestasi terjadi apabila seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *force majeure*, jadi dalam hal ini debitur jelas bersalah.²²

²⁰ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)- Buku Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.113

²¹ *Ibid*, hal. 87

²² A.Qyrom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, hal. 26

Menurut Subekti wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu²³ :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak semestinya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Sejak kapan debitur wanprestasi, di dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi tidak secara otomatis terjadi, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak, bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Sehingga oleh karena itu untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakan upaya hukum yang dinamakan "*in gebreke*

²³ Subekti, Op. Cit, hal.45

stelling" yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi, atau istilah lain sering disebut "somasi".

Dalam hal hapusnya perjanjian yang positif tidak perlu dilakukan *in gebreke stelling*, sedangkan pada hapusnya perjanjian yang negatif *in gebreke stelling* perlu dilakukan, yang positif artinya kreditur mendapat untung sedangkan yang negatif artinya kreditur tidak mendapat untung.²⁴

Menurut Pitlo dalam buku A.Qyrom Syamsudin Meliala, jangan dibedakan antara hapusnya perjanjian yang positif dengan yang negatif, tapi dilihat dari ada tidaknya itikad baik dari debitur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu *in gebreke stelling* atau sommasi tidak perlu dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut²⁵ :

1. karena hanya meminta pelaksanaan perjanjian
2. karena prestasi keliru
3. karena sama sekali tidak ada prestasi
4. karena sudah diatur dalam perjanjian
5. karena debitur mengaku kesalahannya
6. karena oleh undang-undang telah dinyatakan tidak perlu melakukan.

²⁴ A.Qyrom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, hal. 28

²⁵ *Loc.Cit*.

C. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam bentuk perjanjian kredit yang mana pihak-pihak pemberi biaya berkewajiban memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dan pihak konsumen berkewajiban membayar kembali uang tersebut secara cicilan.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo yang dikutip oleh Djumhana perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :²⁶

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Di dalam praktek pembiayaan konsumen perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard segremeent*).

²⁶ M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : PT. Cita Aditya Bakti, 2000), hal 228.

Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah "suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak"²⁷

Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standart sebagai "perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui"²⁸

Ciri dari perjanjian standart adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya²⁹.

Dalam perjanjian standart ada kalanya konsumen bertemu dengan klausula yang menentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu, membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan seperti itu disebut *klausula eksenorative*³⁰

²⁷ Purwahid Patrik, Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat, (Makalah dalam seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993), hal. 1.

²⁸ J. Satrio, Beberapa Seki Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, (Surabaya : 11 Desember 1993), hal. 1.

²⁹ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hal. 2

³⁰ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 30

Klausula ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Dapat pula berbentuk pembatasan ganti rugi yang dapat dituntut, dan dapat pula berbentuk kewajiban untuk tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan kemudian oleh salah satu pihak.

2. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang melibatkan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka perlu adanya jaminan-jaminan.

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Jaminan dalam perjanjian pembiayaan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini

prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*).

b. Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang di beli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang dan (*cessie*) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan¹.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Diskriptif Analisis. Yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya².

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1982), hal 42.

² Ibid, hal 10.

Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen melalui PT. Para Multifinance cabang Tegal.

C. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi atau universe adalah seluruh aspek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti³

Dalam penelitian ini, penulis tidak mungkin melakukan penelitian secara langsung terhadap seluruh populasi, maka penulis hanya mempergunakan sebagian dari populasi yang ada yaitu sejumlah sample yang dipandang refresentatif terhadap populasi itu.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen PT. Para Multifinance cabang tegal yang melakukan wanprestasi.

b. Teknik Sampling

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling*⁴ dimana dalam teknik ini setiap populasi atau orang yang melakukan wanprestasi dalam periode 2002 – 2003 memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara undian dimana tiap unsur dari populasi

³ Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Galia Indonesia, 1990, hal. 14

⁴ Ibid, 51

diberi masing-masing satu nomor secara berturut pada secarik kertas, dimasukkan dalam kotak, lalu di kocok agar tercampur. Peneliti menutup mata dengan kain kemudian mengambil kertas bernomor satu persatu sampai diperoleh nomer yang diinginkan untuk diteliti.

Dengan berdasarkan pada tehnik tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa sample yaitu :

- a. Konsumen pembiayaan kredit, yaitu konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal yang melakukan Wanprestasi, dalam hal ini didapat 10 konsumen sebagai sample yang mewakili konsumen berdasarkan kesamaan jumlah angsuran yang dibayar.

- b. Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Pimpinan Cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal
- 2). Konsumen pembiayaan kredit yang melakukan wanprestasi diambil 10 orang.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Dalam Penelitian ini data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara. Wawancara dilakukan bebas terpimpin yaitu terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, namun dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan terhadap Ulistyanto Kepala Cabang PT Para Multifinance Cabang Tegal dan konsumen yang bermasalah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan ataupun karangan-karangan ilmiah dibidang hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti antara lain :

- a. KUH Perdata
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Buku-buku hasil karya para sarjana
- d. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
- e. Makalah / bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian
- f. Dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen

E. Tehnik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul dan diteliti kebenarannya kemudian dipilah-pilah dan diinterpretasikan melalui konsep-konsep, teori-teori, yang telah ditulis di dalam bab II tesis ini kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu menyusun secara sistematis dari hasil

penelitian atau dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lain tanpa adanya perhitungan statistik dan kemudian ditulis dalam bentuk tesis.

F. Teknik Pengecekan Data

Pengecekan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data hasil pengamatan dan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. Serta membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda dengan stratifikasi sosialnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. PARA MULTIFINANCE Cabang Tegal

PT. Para Multifinance adalah sebuah anak perusahaan dibawah PT. Para Group Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam akta tanggal 13 Februari tahun 1996, Nomor 13 Tambahan No. 1691 dan beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir di ubah dengan Akta No. 302 tanggal 30 Desember tahun 1997 dibuat dihadapan Tri Sasono, SH Notaris di Jakarta dan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, SK No. C2-9337.HT.0104-TH 1998 tanggal 22 juli 1998.

Untuk mengembangkan usahanya PT. Para Multifinance membuka beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu cabangnya terletak di kota Tegal yang dibuka pada bulan April tahun 2001.

Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang dengan membawahi beberapa bagian antara lain bagian analisis, surveyor, marketing, debt collector dan bagian keuangan untuk menunjang operasional cabang. PT. Para Multifinance Cabang Tegal untuk mengoperasikan cabangnya dibantu oleh 39 orang karyawan

Sasaran konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen ini adalah pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah pembiayaan alat / modal.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Para Multifinance Cabang Tegal sebagai Perusahaan pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor type roda 2 dengan merk Honda, Suzuki, Kawasaki dan Yamaha dan sampai saat ini jumlah konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal telah mencapai 1.924 orang konsumen¹.

a. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan konsumen Pada PT. Para Multifinance Cabang Tegal

Untuk memperoleh kredit pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal maka konsumen harus memenuhi persyaratan :

- Fotocopy KTP
- Adanya barang jaminan
- Surat kuasa
- Mengisi formulir permohonan fasilitas pembiayaan dengan pembiayaan konsumen.
- Menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan konsumen.

Ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh konsumen untuk memperoleh pembiayaan pada PT. Para Multifinance. Prosedur awal pengajuan permohonan adalah :

1. Pihak konsumen datang ke dealer (selaku *Supplier*) yang dipilih sendiri oleh konsumen untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai :

¹ Ulistyanto, Wawancara Kepala Cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal, tanggal 23 Desember 2003.

- a. *Type* sepeda motor merk apa yang akan dibeli.
 - b. Berapa besarnya uang muka yang harus dibayar.
 - c. Berapa besar angsuran yang sanggup dibayar oleh konsumen.
2. Setelah ditemukan kata sepakat maka pihak konsumen kemudian memberikan alamat rumah untuk di *survey*.

Proses atau tahapan tersebut dinamakan dengan prosedur pembelian pembiayaan konsumen dan tidak semua permohonan ini dapat direalisasikan, ada kemungkinan untuk ditolak atau dibatalkan, karena belum adanya kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pada tahap Pengajuan permohonan ini tidak ada *form* khusus yang disediakan dari pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal, adapun *form* awal dari pihak dealer selaku supplier yang ditujukan kepada pihak pembiayaan konsumen adalah form permohonan kredit atau permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang berisi data-data calon konsumen.

Data-data calon konsumen adalah sebagai berikut :

1. Nama calon konsumen
2. Nomer KTP
3. Alamat
4. Pekerjaan calon konsumen
5. Nomer telepon

Waktu yang diperlukan dari pengajuan sampai dengan persetujuan permohonan rata-rata satu hari, tapi hal ini sangat tergantung dari waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil *survey* dan kelengkapan-kelengkapan data-data yang dibutuhkan.

Penyampaian pemberitahuan permohonan kepada konsumen adalah melalui *dealer* dengan cara diterbitkannya PO (*Purchase Order*) yang bisa diterbitkan kurang lebih 1 (satu) jam setelah hasil *survey* dari konsumen, kemudian atas PO (*Purchase Order*) tersebut pihak *dealer* memberitahu kepada konsumen melalui surat tertulis.

b. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan

Dalam mengajukan permohonan, pihak konsumen sebagai pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Para Multifinance Cabang Tegal yaitu, sebagai berikut :

- a. DP Murni > 10 % dari harga OTR, tidak termasuk angsuran 1, premi asuransi, dan biaya administrasi.
- b. Untuk Angsuran: minimal 35 % dari penghasilan (*fixed income*) tidak termasuk uang lembur, insentive ataupun bonus.
- c. Memiliki rumah sendiri (bukan kontrakan), jika pemohon masih tinggal bersama orang tua dan atau saudaranya maka orang tua atau saudaranya harus bertindak sebagai penjamin.
- d. Usia Pemohon adalah :
 - Usia Pemohon > 21 tahun (kecuali sudah menikah)
 - Usia Pemohon < 55 tahun untuk karyawan dan Pegawai negeri

- Usia Pemohon < 60 tahun untuk wiraswasta dan guru
 - Usia Pemohon < 65 tahun untuk Guru besar
 - Usia Pemohon < 60 tahun tidak boleh menggunakan KTP
 - Seumur hidup kecuali ada peraturan Pemda setempat.
- e. Domisili konsumen harus berada dalam wilayah kerja operasional yang bersangkutan.
- f. Surat-surat yang perlu dilampirkan yaitu:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kartu Keluarga
 - PBB / Rek. Listrik bulan terakhir
 - Slip gaji / Keterangan penghasilan
- g. Jika pemohon seorang duda atau janda harus ada surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang, apabila perceraian karena meninggal dunia maka harus ada akta kematian.

c. Analisis dan evaluasi Data

Pihak PT. Para Multifinance mengadakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diterima, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- Kunjungan ke tempat konsumen (*plant visit*)
- Pengecekan ke tempat lain (*credit cheking*)
- Orientasi secara umum dan khusus.

Di dalam melakukan analisis ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu :

- a. Karakter yaitu karakter si konsumen, dimana pihak analisis harus juga memperhatikan bagaimana karakter dari seseorang yang akan menjadi calon konsumennya.
- b. Kapasitas adalah, apakah sesuai penghasilan si konsumen dengan besarnya cicilan yang diambil.
- c. Kepemilikan Rumah yaitu benarkah rumah yang ditinggali oleh konsumen adalah miliknya sendiri, karena apabila bukan miliknya maka sewaktu-waktu apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji si konsumen dapat menghindarinya dengan cara pindah alamat.
- d. Kemampuan bayar konsumen yaitu apakah konsumen memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan analisa berkisar antara 1 sampai dengan 3 hari tergantung dari keadaan di lapangan. Pihak yang bertanggung jawab melakukan analisa ini adalah *surveyor* dan *head surveyor*.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data tersebut diatas maka dapat dihasilkan 3 alternatif keputusan yaitu:

- Keputusan menolak permohonan, dalam penolakan ini konsumen akan diberitahu alasan-alasan penolakan.
- Keputusan menunda permohonan, apabila pihak *surveyor* merasa masih ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi.
- Mengabulkan permohonan.

Apabila pihak *surveyor* menyatakan bahwa pengajuan permohonan berdasarkan hasil analisa data memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka yang berwenang menyetujui pemberian pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan atau dengan plafon uang sebesar Rp. 25.000.000,- adalah kantor PT. Para Multifinance Cabang Tegal, sedangkan apabila konsumen mengambil lebih dari 2(dua) unit kendaraan atau pokok utang lebih dari Rp. 25.000.000,- maka harus melalui persetujuan/*approval* kantor pusat atau Direktur Marketing Pusat.

d. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Apabila permohonan tersebut telah diterima oleh pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal, maka proses berikutnya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen .

Dalam praktek pada PT. Para Multifinance Cabang Tegal, perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam *form* tertentu yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan.

Adapun maksud digunakan perjanjian secara tertulis oleh PT. Para Multifinance adalah untuk dijadikan alat bukti yang tertulis tentang adanya perikatan antara PT. Para Multifinance dengan Konsumen, dan untuk efisiensi karena perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berulang-ulang dengan konsumen yang berbeda akan tetapi memiliki bentuk tindakan hukum yang sama.

Hanya saja, yang menjadi persoalan apakah perjanjian baku yang di buat oleh pemberi dana tersebut klausula-klausulanya layak atau tidak apabila dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999.

Secara kontrak, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, perjanjian baku itu diperbolehkan asal tidak mencantumkan syarat eksonerasi yaitu syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seorang dalam melaksanakan perjanjian seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen².

Undang-undang ini juga memberikan nuansa baru, karena mengatur agar pelaku usaha tidak semena-mena mencantumkan klausula baku dalam menawarkan barang dan/atau jasa.

Di dalam Undang-undang tersebut tidak secara tegas dan jelas bidang usaha dari pelaku usaha, tetapi dapatlah disimpulkan secara umum bahwa setiap penjual barang / jasa termasuk tidak terbatas pihak pembiayaan konsumen yang merupakan suatu lembaga pembiayaan atau "penjual jasa" pula.

Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah :

² Purwahid Patrik, Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat, (Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya 11 Desember 1993), hal 11.

"Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Konsumen yang mengkonsumsi jasa dalam transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan dinamakan Konsumen.

Di dalam Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut, Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan konsumen menyatakan batal demi hukum dalam arti perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Sehingga atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan tersebut, maka dalam ayat (4) pasal tersebut mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Jadi pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan / atau perjanjian sepanjang Perjanjian baku atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun ayat (2).

Sehubungan dengan adanya jaminan fidusia didalam Pelaksanaan perjanjian, maka perusahaan pembiayaan konsumen seringkali memperjanjikan hak untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf d dikatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen.

Perlu dikemukakan di sini bahwa tidak semua klausula baku atau perjanjian hak mengandung muatan negatif yang dapat merugikan konsumen, mengingat banyak klausula telah diterima dan lazim digunakan di lembaga pembiayaan seperti pembiayaan konsumen. Sebenarnya tidak dapat di ramal sebelumnya, kalau adanya klausula seperti yang dimaksudkan agar perusahaan pembiayaan konsumen dapat menerima jaminan fidusia, maka klausula tersebut adalah layak. Dalam situasi dimana terjadinya wanprestasi akibat dari macetnya pembayaran, maka perusahaan pembiayaan konsumen demi untuk mengamankan diri terhadap kemungkinan konsumen tidak menjalankan atau memenuhi, atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, terpaksa menetapkan adanya jaminan secara fidusia didalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

Disamping itu dari hasil penelitian penulis juga melihat di PT. Para Multifinance Cabang Tegal beberapa kali terjadi wanprestasi yang diakibatkan dari tidak lancarnya pembayaran angsuran oleh konsumen. Jadi hak untuk melakukan segala tindakan hukum untuk menyita atau mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan berada, serta menjual atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tidak selalu harus diartikan penyitaan barang secara semena-mena oleh pihak pembiayaan konsumen, karena pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat

perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun ayat (2).

e. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan konsumen

Jangka waktu pemberian pembiayaan konsumen dimulai pada saat konsumen menerima barang sampai pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada PT. Para Multifinance Cabang Tegal jangka waktu pemberian pembiayaan adalah 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, dan 3 tahun.

Jika terjadi kelalaian maka pihak pemberi dana berhak untuk mengakhiri perjanjian. Konsumen dan pemberi dana bisa menyimpang dari ketentuan waktu tersebut asal pihak konsumen bisa memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu misalnya konsumen bisa membayar dengan tunai kepada PT. Para Multifinance semua jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen berakhir pada saat konsumen melunasi hutangnya.

f. Jaminan pada perjanjian Pembiayaan konsumen

Transaksi pembiayaan konsumen merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen, maka untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pemberi dana jaminan berupa kebendaan ataupun uang

lebih diutamakan dari pada jaminan yang hanya berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Jaminan-jaminan tersebut antara lain :

a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*)

b. Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang di beli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (promissory notes), kuasa menjual barang dan (cessie) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan

komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

Dalam perjanjian pembiayaan ini juga dinyatakan konsumen dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas kendaraan kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan secara tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Guna menjamin pelunasan kembali segala hutang konsumen kepada perusahaan pembiayaan, maka konsumen memberi kuasa khusus kepada PT. Para Multifinance sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 sub g Perjanjian Pembiayaan, yaitu :

"Konsumen memberi hak Khusus kepada Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap pejabat yang berwenang memberi keterangan, membuat / menyuruh membuat, menanda-tangani Akta Notaris mengenai penyerahan hak milik secara fidusia atas kendaraan, dan mendaftarkan pada lembaga yang berwenang, hal demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali Perseroan juga diberikan kuasa oleh konsumen untuk melaksanakan pemblokiran STNK dan BPKB kendaraan tersebut pada instansi yang terkait dengan pemblokiran tersebut"

g. Asuransi Pada Perjanjian Pembiayaan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap perjanjian pembiayaan adalah adanya resiko. Resiko kerugian dan kerusakan sehubungan dengan objek pembiayaan menurut pembagian kepentingan dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilimpahkan kepada pihak konsumen.

Konsumen berkewajiban untuk menutup asuransi terhadap objek pembiayaan. Sedangkan pemberi dana berkepentingan agar sebagai pemilik barang ia berhak menagih uang santunan tersebut dari pihak asuransi.

Segi asuransi sebenarnya tidak terlepas dari persoalan pembebanan "resiko". Asuransi merupakan salah satu sarana untuk membebaskan resiko kepada pihak ketiga dengan membayar imbalan. Pihak yang harus menutup asuransi sehubungan dengan tanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak konsumen.

Konsumen harus mengasuransikan Kendaraan dari segala resiko atau bahaya-bahaya / kecelakaan / kehilangan dengan premi yang dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. Konsumen juga memberi kuasa kepada pihak perseroan untuk menutup asuransi atas kendaraan tersebut selama jangka waktu pembiayaan, hal ini diatur dalam Pasal 10 sub f perjanjian pembiayaan PT. Para Multifinance Cabang Tegal dengan konsumen.

Seluruh kendaraan bermotor yang termaksud dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik fidusia PT. Para Multifinance cabang Tegal telah diasuransikan dengan kondisi TLO (*Total Lost Only*), yaitu jenis asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan tersebut.

Apabila terjadi salah satu dari peristiwa seperti yang tersebut diatas, maka pihak konsumen harus :

Melaporkan kejadian tersebut pada paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak saat kejadian kepada PT. Para Multifinance dan kepada Kantor Polisi setempat (polres/polsek).

Konsumen juga harus Melengkapi, menandatangani dan mengirimkan segera dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat
- Fotocopy KTP dan SIM C tertanggung
- STNK asli dan kunci kontak
- Formulir klaim
- Surat subrogasi (*discharge and receipt*)
- Surat Kuasa Pengurusan Pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi.

h. Bunga Pada Perjanjian Pembiayaan / Perjanjian Pembiayaan konsumen

Sebelum kontrak pembiayaan konsumen dimulai, antara konsumen dan pihak PT. Para Multifinance melakukan Negosiasi, biasanya dalam menentukan besarnya bunga pihak perseroan terlebih dahulu memperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dana tersebut ditambah dengan *spread* yang merupakan keuntungan bagi pihak perseroan.

Masing-masing pihak bisa juga merundingkan secara langsung mengenai besarnya *interest* (bunga) secara keseluruhan yang harus menjadi beban konsumen. Dalam kalkulasi mengenai bunga, kita mengenal ada tiga sistem bunga yaitu: *fixed rate*, *floating rate*, dan *flat rate*. *Fixed rate* adalah penentuan besar *interest* secara tetap dalam jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen, jadi seandainya pada saat kontrak pembiayaan konsumen telah ditentukan interest sebesar 22%, yaitu biaya dana 20% ditambah *spread* 2% maka interest rate 22% tersebut berlaku hingga akhir masa pembiayaan konsumen. *Floating rate* berkaitan dengan naik turunnya suku bunga antar bank, contohnya bila suku bunga antar bank 20% dan *spread*nya 2% maka interest ratenya 22%, bila suku bunga turun menjadi 19% dan *spread*nya 2% maka interest ratenya menjadi 21%, sedangkan *Flat rate* atau *add-on* adalah sistem penentuan interest yang sering dipakai oleh toko-toko penjual barang secara cicilan.

Dalam perhitungan suku bunganya PT. Para Multifinance Bunga dihitung atas pinjaman pokok mulai dari tanggal penarikannya dengan menggunakan sistem *Fixed rate*.

Bunga kredit perjanjian pembiayaan yang ditetapkan oleh PT. Para Multifinance adalah sebesar³ :

³ *Ibid*

Tahun	Besarnya suku bunga per tahun
2001	22%
2002	22%
2003	29%
2004	23%

Sumber : PT. Para Multifinance Cabang Tegal

Dari hasil penelitian pada pejabat PT. Para Multifinance Cabang Tegal, untuk kenaikan suku bunga pihak perseroan akan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pada masing-masing konsumen, karena setiap tindakan PT. Para Multifinance Cabang Tegal dalam menaikkan atau menurunkan suku bunganya selalu di dahului dengan mengirimkan surat pemberitahuan. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 6 perjanjian pembiayaan, yaitu :

“Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka perseroan dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran konsumen kepada perseroan sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen dan konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia pada Sertifikat Bank Indonesia⁴.

Dalam menetapkan bunga, PT. Para Multifinance selalu mengikuti suku bunga yang berlaku, menurut pendapat penulis hal itu justru menguntungkan konsumen karena saat ini tingkat suku bunga dipasaran relatif menurun, sehingga banyak konsumen tertarik untuk mengajukan

⁴ *Ibid*

permohonan pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal. Dari hasil penelitian seluruh responden yang merupakan konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal, menyatakan naik turunnya suku bunga dari 29% menjadi 23% per tahun tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi mereka, akan tetapi ada beberapa konsumen yang merasa keberatan dengan kebijaksanaan PT. Para Multifinance Cabang Tegal dalam hal menentukan denda untuk keterlambatan pembayaran⁵, untuk setiap hari keterlambatan membayar jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh konsumen, konsumen wajib membayar kepada perseroan denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut sebesar 5%o (lima promil) per hari, denda mana dapat ditagih oleh perseroan secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu kepada konsumen.

Untuk setiap keterlambatan yang telah mencapai 30 (tiga puluh) hari atas setiap satu tagihan / kwitansi yang tidak dilakukan pembayaran oleh konsumen kepada perseroan, disamping denda sebesar 5%, Konsumen juga dikenakan biaya Penagihan Khusus yang jumlahnya akan ditentukan dan diberitahukan dalam surat terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian, sedangkan untuk pelunasan dipercepat konsumen diwajibkan membayar seluruh sisa angsuran yang belum dibayar kepada Perseroan, berikut denda keterlambatannya.

⁵ Questioner, Konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

Banyak keluhan keberatan yang disampaikan konsumen sehubungan dengan adanya tambahan denda dalam hal keterlambatan pembayaran yang dirasakan sangat memberatkan. Sehubungan dengan keberatan itu beberapa konsumen mengajukan surat pernyataan keberatannya dan datang kepada PT. Para Multifinance Cabang Tegal. Alasan keberatan yang dikemukakan oleh konsumen atas denda yang dikenakan pada saat keterlambatan pembayaran adalah⁶ :

1. Besarnya Prosentase denda yang diberikan sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran dirasa memberatkan karena besarnya penghasilan konsumen sering tidak tetap.
2. Pada saat masa pembayaran, beberapa konsumen terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak memiliki penghasilan.

Menghadapi keberatan dari Konsumennya, PT. Para Multifinance Cabang Tegal melalui pimpinan cabangnya menyatakan bahwa kebijaksanaan itu telah diusahakan yang terbaik untuk konsumen, mengingat dikenakan denda dalam hal keterlambatan pembayaran sama sekali tidak didasari niat untuk merugikan apalagi memberatkan konsumen dalam memenuhi prestasinya, karena pihak PT. Para Multifinance telah berusaha untuk tidak memberatkan konsumen dengan menggunakan sistem *Fixed rate* pada suku bunga pembiayaannya.

⁶ Ulistyanto, Wawancara Kepala PT. Para Multifinance Cabang Tegal, 23 Desember 2003.

Dari hasil penelitian, Pimpinan cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sistem *Fixed rate* diharapkan konsumen tidak perlu merasa cemas akan naik-turunnya suku bunga dipasaran, karena dalam hal pembayaran besarnya suku bunga telah ditentukan secara tetap selama jangka waktu kontrak pembiayaan⁷.

B. Tanggung Jawab Konsumen dan PT. Para Multifinance Cabang Tegal Terhadap Objek Pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu wujud kebebasan individu pengusaha atau perorangan untuk menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam Perjanjian baku yang juga dikenal dengan perjanjian standart (*standart contract*) artinya perjanjian ini baik model, rumusan maupun ukurannya bersifat baku atau standart.

Mengenai isi dari perjanjian, ada standart baku yang oleh pihak-pihak yang terlibat harus dicantumkan sesuai dengan Surat Pengumuman Direktur Jenderal Moneter No. Peng 307/DJM/III.1/7/1974 menegaskan bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen salah satunya harus memuat secara terperinci mengenai objek perjanjian pembiayaan konsumen.

Didalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat barang modal yang biasanya dikenal sebagai objek pembiayaan konsumen, barang tersebut dibeli oleh pemberi dana atas permintaan konsumen / konsumen,

⁷ Ibid

objek pembiayaan ini bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Pada PT. Para Multifinance yang menjadi objek pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor khusus roda 2, dengan merk Honda, Suzuki, Kawasaki dan Yamaha.

Setiap perjanjian dan atau kesepakatan yang diadakan maupun dibuat oleh dua orang atau lebih pasti akan menimbulkan pula akibat hukum baik merupakan hak, kewajiban maupun tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat berdasarkan isi kesepakatan atau perjanjian, baik itu untuk melakukan sesuatu hal tertentu, terhadap pemenuhan suatu prestasi maupun tidak melakukan sesuatu asalkan hal itu memang dikehendaki berdasarkan isi perjanjian yang disepakati berdasarkan fungsinya masing-masing secara hukum dan rentang waktu yang diperjanjikan sebelumnya. Karena kesepakatan yang mereka buat tersebut adalah merupakan Undang-undang yang mengikat bagi mereka yang menandatangani isi perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh peraturannya, yaitu kalau para pihak telah mengatur sesuatu hal dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka ketentuan-ketentuan perjanjian yang sama tidak berlaku lagi, hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila para pihak telah sepakat untuk

mengikatkan diri didalam perjanjian maka mereka juga memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Definisi dari tanggung jawab adalah : Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal yang terjadi) boleh dituntut / dipersalahkan / diperkarakan⁸.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, tanggung jawab adalah keadaan dimana pihak konsumen maupun pihak perseroan sepakat untuk mentaati dan memenuhi apa yang tercantum didalam kontrak pembiayaan konsumen dan apabila salah satu pihak ada yang melanggarnya maka pihak tersebut akan menerima konsekuensinya.

Sama seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian dan kontrak pembiayaan konsumen juga memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri, yaitu : konsumen dan pemberi biaya sebagai pengguna dan pemberi jasa, disamping juga supplier yang akan mendatangkan dan mengadakan barangnya bagi kepentingan konsumen melalui pemberi biaya.

Akibat hukum tersebut dapat berupa hak dan tanggung jawab untuk memenuhi sesuatu yang dikehendaki dan disepakati berdasarkan fungsinya masing-masing secara hukum menurut rentang waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Karena ada batasan waktu maka tanggung jawabnya juga sebatas waktu perjanjian itu dilaksanakan yaitu :

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Dept. P dan K, B/P, 1990.

a. Tanggung jawab bagi Pihak PT. Para Multifinance

- Selama masa pembiayaan konsumen atau jangka waktu pembiayaan konsumen berlangsung menyediakan dana bagi kepentingan konsumen sebagai pengguna jasanya serta berupaya sedapat mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan objek *capital equipment* yang dibutuhkan oleh konsumen.
- Mengawasi keberadaan kendaraan agar tetap berada ditangan konsumen sampai masa kredit selesai.
- Jika juga diperjanjikan PT. Para Multifinance juga memberi jaminan kenikmatan terhadap service, perawatan (*maintenance*) untuk kerusakan yang tidak dapat ditangani oleh Konsumen.

Tanggung jawab ini sesuai dengan fungsi pembiayaan konsumen yaitu sebagai salah satu system pembiayaan untuk dapat memperoleh barang modal (kendaraan bermotor roda dua) yang diperlukan konsumen dengan jalan membeli, kemudian dananya dikembalikan melalui cara angsuran.

Begitu juga mengenai pengawasan terhadap keberadaan kendaraan, PT. Para Multifinance memiliki kewajiban untuk mengetahui bahwa kendaraan tersebut tetap berada ditangan konsumen dan tidak di pindah tangankan kepada pihak lain sampai angsuran kreditnya selesai karena apabila konsumen wanprestasi maka PT. Para Multifinance dapat melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut.

Pemberian jaminan kenikmatan berupa service, perawatan untuk kerusakan yang tidak dapat ditangani konsumen juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari PT. Para Multifinance Cabang Tegal, hal ini dilakukan agar konsumen yakin bahwa kendaraan tetap dalam keadaan baik hingga perjanjian pembiayaan konsumen berakhir dan kendaraan menjadi milik konsumen.

Penulis sependapat dengan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen dalam hal terjadi pencurian atau hilangnya objek jaminan ini, hanya saja hendaknya pihak konsumen berusaha dengan baik untuk menjaga dan memelihara objek jaminan yang ada sehingga PT. Para Multifinance tidak dirugikan dan konsumen akan lebih dipercaya dan diberi kemudahan apabila dimasa yang akan datang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kendaraan di PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

b. Tanggung jawab Konsumen

- Konsumen wajib memelihara dan mengurus kendaraan tersebut secara sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri dan bila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah maka bagian itu termasuk dalam penyerahan secara fiducia kepada perseroan.
- Konsumen dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas

kendaraan kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan secara tertulis dari perseroan.

Menurut Ulistyanto kepala cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal, konsumen juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan pihak PT. Para Multifinance, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa konsumen memiliki tanggung jawab untuk memelihara kendaraan dengan baik dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan dengan biaya sendiri kecuali kerusakan itu tidak dapat di tangani oleh konsumen seperti kerusakan yang terjadi pada mesin yang baru diketahui oleh konsumen setelah kendaraan berada ditangan konsumen⁹.

Diakhir perjanjian pembiayaan konsumen ini konsumen dapat memiliki kendaraan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari hasil penelitian bahwa akibat dari tidak stabilnya perekonomian di Indonesia saat ini memang menjadi penyebab peningkatan jumlah konsumen yang bermasalah, dimana banyak konsumen yang harus kehilangan pekerjaannya karena di PHK dan itu juga berpengaruh pada pembayaran kredit dalam perjanjian pembiayaan¹⁰.

Kepada konsumen yang bermasalah itu, tindakan yang dilakukan oleh PT. Para Multifinance Cabang Tegal adalah :

1 Dalam hal Keterlambatan Pembayaran :

- Apabila konsumen terlambat memenuhi prestasinya 7 hari dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, maka bagian penagihan

⁹ Ulistyanto, Wawancara, Kepala Cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal, tanggal 5 Januari 2004

¹⁰ Questioner, Konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

akan memberikan peringatan lisan melalui telepon kepada konsumen.

- Apabila konsumen terlambat memenuhi prestasinya 15 hari dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, maka bagian penagihan akan memberikan peringatan berupa surat peringatan pertama kepada konsumen.
- Apabila konsumen terlambat memenuhi prestasinya lebih dari 30 hari dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, maka konsumen akan diberikan surat peringatan yang kedua.

2 Dalam hal terjadinya kemacetan pembayaran tindakan yang dilakukan oleh PT. Para Multifinance adalah memberi peringatan secara tertulis kepada konsumen, dimana bagian penagihan PT. Para Multifinance Cabang Tegal kemudian mendatangi konsumen untuk melakukan investigasi, sehingga dapat mengetahui kendala atau masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen sehingga dapat diberikan solusi, akan tetapi apabila konsumen dinilai meragukan atau tidak memiliki itikad baik maka pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal akan melakukan tindakan atau upaya selanjutnya yaitu :

- Apabila kendaraan masih berada ditangan konsumen, maka akan segera dilakukan penarikan barang / objek pembiayaan konsumen atau segera mengamankan kendaraan tersebut.
- Apabila kendaraan sudah tidak ada ditangan konsumen dalam artian barang tersebut digadaikan atau dijual oleh konsumen, maka pihak

PT. Para Multifinance akan mengajukan laporan mengenai penggelapan ke Polsek terdekat, kemudian setelah kendaraan tersebut berada ditangan Polisi biasanya pihak PT. Para Multifinance Cabang Tegal akan mengambil kembali kendaraan tersebut dengan cara bon pinjam atau dalam istilah Pembiayaan konsumen yaitu pengambilan putus.

- Apabila kendaraan sudah berada di pihak PT. Para Multifinance, pihak konsumen akan diberi surat panggilan untuk datang ke kantor PT. Para Multifinance Cabang Tegal, apabila pihak konsumen tidak memenuhi panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan ke dua, dan apabila konsumen tidak juga memenuhi panggilan berikutnya, maka selanjutnya pihak PT. Para Multifinance akan mengadakan pelelangan terhadap kendaraan tersebut. Hal ini biasanya terjadi pada konsumen yang sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya atau lebih dikenal dengan istilah Wanprestasi.

C. Upaya Hukum Yang ditempuh PT. Para Multifinance Cabang Tegal apabila Konsumen Wanprestasi

Lahirnya suatu perjanjian menurut asas konsensualisme adalah pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari objek perjanjian. Kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan dan persetujuan ini disebut dengan subjek dalam suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan apalagi sengaja beritikad buruk tentu akan ada konsekuensinya, yang diterima baik secara pidana dan perdata, jika salah satu pihak ada yang dirugikan secara material dapat diselesaikan dengan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

Setelah perjanjian lahir, maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut atau apa yang disebut prestasi, apabila dalam perjanjian pembiayaan konsumen pihak konsumen tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan maka ia bisa dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari hasil penelitian diketahui dari 1.924 orang jumlah konsumen PT. Para Multifinance, dalam praktek perjanjian pembiayaan ada sekitar 180 orang konsumen yang melakukan wanprestasi¹¹.

Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal biasanya berupa keterlambatan pembayaran dan kemacetan

¹¹ Ulistyanto, Wawancara, Kepala Cabang PT. Para Multifinance Tegal Tanggal 5 Januari 2004

dalam hal pembayaran. Sebelum menyatakan konsumennya melakukan wanprestasi, pihak perusahaan harus bisa membuktikan apakah konsumennya telah melakukan suatu kelalaian atau kealpaan sehingga sering tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang telah dijanjikan.

Menurut Prof Subekti S.H. yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian dan dapat dikatakan ia melakukan Wanprestasi.

Terhadap kelalaian atau kealpaan konsumen (sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), ada ancaman berupa sanksi atau hukuman. Adapun hukuman atau akibat-akibat yang harus ditanggung oleh konsumen yang lalai menurut Prof. Subekti S.H.¹² ada empat macam, yaitu :

- 1 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain ganti-rugi.
- 2 Pembatalan perjanjian atau bisa juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3 Peralihan resiko
- 4 Membayar perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah konsumen melakukan wanprestasi atau tidak dan hal itu harus dibuktikan dimuka hakim apabila kasusnya diperkarakan di pengadilan.

¹² Prof. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, Penerbit Pembimbing Masa, Jakarta, 1975 hal 45

Peralihan resiko di PT. Para Multifinance Cabang Tegal dibebankan pada Pihak Asuransi yang ditujuk oleh pihak PT. Para multifinance, sedangkan yang dimaksud dengan Resiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara adalah

"Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang dijadikan objek jaminan".

Menurut pembagian kepentingan dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen resiko kerugian dan kerusakan sehubungan dengan objek pembiayaan dapat dilimpahkan kepada pihak konsumen. Sedangkan asuransi merupakan salah satu sarana untuk membebankan resiko kepada pihak ketiga dengan membayar imbalan. Oleh karena resiko pada pokoknya ditanggung oleh konsumen, maka imbalan yang harus dibayarkan kepada asuransi seharusnya ditanggung pula oleh konsumen.

Pihak asuransi menjamin akan menanggung resiko apabila Mengenai hilangnya objek pembiayaan konsumen yang disebabkan keadaan yang memaksa (*force majeure*) seperti : akibat banjir, kebakaran, gempa bumi, dan pencurian yang bukan karena kesengajaan konsumen maka Asuransi akan menjamin dengan kondisi TLO (Total Lost Only), yaitu jenis asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian, sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan tersebut.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multifinance Cabang Tegal, yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan PT. Para Multifinance yang diakibatkan oleh kelalaian konsumen. Mengenai ganti kerugian ini akan dibahas pada kasus Tuan Ali Harjanto yang melakukan wanprestasi dengan cara penipuan dan penggelapan objek jaminan pembiayaan konsumen.

Untuk hilangnya barang yang menjadi objek jaminan karena pencurian maka pihak asuransi bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mencari kebenaran apakah laporan pencurian itu benar atau hanya sekedar itikad buruk dari konsumen yang menyatakan seolah-olah kendaraannya dicuri. Kasus seperti ini pernah terjadi di PT. Para Multifinance Cabang Tegal pada bulan April tahun 2002, ada konsumen Ali Harjanto melaporkan bahwa kepada pihak kepolisian mengenai kehilangan kendaraannya. Satu minggu kemudian polisi meminta pihak PT. Para Multifinance dan pihak asuransi untuk datang ke kantor polisi. Polisi memberitahukan bahwa laporan pencurian oleh Tuan Ali Harjanto tersebut ternyata palsu, karena setelah diselidiki oleh Polisi kendaraan tersebut tidak benar-benar dicuri akan tetapi sengaja dipindahtangankan kepada pihak lain yaitu keponakannya sendiri yang bernama Ahmad bin Mukhlis, Tuan Ali kemudian ditangkap oleh Polisi dan Ahmad yang membeli objek tersebut juga ikut dipanggil untuk dijadikan saksi. Kepada Polisi, Tuan Ali mengakui perbuatannya dilakukan karena dirinya tidak sanggup lagi membayar angsuran kendaraan tersebut dan karena alasan ekonomi sehingga

akhirnya Tuan Ali menjual kendaraannya kepada keponakannya. Objek jaminan yang berupa satu unit kendaraan roda dua merk kawasaki disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti.

Kasus ini akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian resort Brebes karena ini sudah merupakan kasus penipuan dan penggelapan seperti yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana, yaitu perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Dari pasal ini disimpulkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tuan Ali dengan melakukan penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan menyalah gunakan kepercayaan PT. Para Multifinance kepadanya untuk menjaga dan memelihara kendaraan tersebut sesuai tanggung jawabnya sebagai konsumen sampai masa perjanjian pembiayaan konsumen berakhir.

Menurut Ulistyanto, Kepala Cabang PT. Para Multifinance Tegal penyelesaian masalah hilangnya barang atau objek jaminan melalui jalur hukum adalah merupakan upaya untuk membuktikan tanggung jawab pihak PT. Para Multifinance terhadap objek jaminan. Sedangkan pihak asuransi tidak dapat menjamin karena kasus ini sudah terbukti merupakan kasus penipuan dan penggelapan¹³.

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Juli 2002. dalam persidangan tersebut selain Tuan Ahmad, PT. Para Multifinance juga diajukan sebagai saksi, yang wajib memberi kesaksian dan

¹³ Ulistyanto, Wawancara Kepala Cabang PT. Para Multifinance Tegal, tanggal 5 Januari 2004

dilakukan dibawah sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Tuan Ahmad sendiri menyatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraan yang dia beli masih merupakan objek jaminan dalam perjanjian Pembiayaan konsumen antara Tuan Ali dan PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan melalui proses persidangan, putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah menyatakan bahwa Tuan Ali dinyatakan bersalah karena Tuan Ali terbukti melakukan penipuan terhadap PT. Para Multifinance dan penggelapan dengan memindahtangankan kepada pihak lain kendaraan yang dijadikan objek jaminan, dalam pemberian pembiayaan dengan fasilitas pembiayaan konsumen, ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen atau konsumen dan pemberi dana. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang kedudukan. Oleh karena itu, konsumen sebagai pemegang kendaraan didalam melakukan suatu perbuatan hukum harus selalu didasarkan pada hati nurani yang jujur dan didasarkan pada norma kepatutan yang ada didalam masyarakat, hakim juga memutuskan kendaraan yang berupa satu unit motor merk kawasaki dikembalikan kepada PT. Para Multifinance.

Upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Para Multifinance melalui gugatan pengadilan merupakan jalan yang tepat demi menjamin

kepastian hukum dan menuntut rasa keadilan. Dalam Pasal 1338 ayat 3 disebutkan bahwa semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan kata lain pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar. Perbuatan yang dilakukan oleh Tuan Ali Harjanto sebagai konsumen PT. Para Multifinance Cabang Tegal memiliki itikad buruk dengan melakukan penipuan dan penggelapan kendaraan yang masih belum berakhir perjanjian pembiayaannya. Hakim didalam kasus ini diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai melanggar kepatutan atau keadilan, dari keputusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu merupakan keputusan yang harus diterima dan dihormati oleh masing-masing pihak, begitupun dengan PT. Para Multifinance yang selalu percaya pada itikad baik dari konsumennya untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan seperti memenuhi kewajibannya untuk menjaga kendaraan yang merupakan objek jaminan dan membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan.

Dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, maka pihak Tuan Ahmad harus merelakan kendaraan yang telah ia beli diserahkan kembali kepada PT. Para Multifinance. Dalam hal ini pihak PT. Para Multifinance akhirnya mengambil langkah yang bijaksana yaitu menawarkan kepada Tuan Ahmad untuk membeli kendaraan tersebut melalui pelelangan yang akan dilakukan oleh PT. Para Multifinance. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi sisa angsuran Tuan Ali

dan sisanya dikembalikan kepada Tuan Ahmad sejumlah yang ia terima dari Tuan Ali pada saat menjual kendaraannya. Menurut keterangan Tuan Ahmad ia baru memberikan Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- pada Tuan Ali sebagai DP.

Dalam kasus diatas langkah kebijakan ini diambil oleh pihak PT. Para Multifinance dengan beberapa alasan yaitu kemungkinan untuk Tuan Ali untuk melunasi angsurannya kendaraannya tidak mungkin diharapkan mengingat saat ini konsumen berada di tahanan dan merupakan tulang punggung keluarga sedangkan isterinya hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja.

Kasus kedua yang terjadi di PT. Para Multifinance Cabang Tegal yaitu mengenai Wanprestasi yang terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh konsumen dalam pembayaran angsuran, menurut Ulistyanto, Kepala Cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal, penyelesaian permasalahannya sering tidak melalui pengadilan¹⁴, seperti kasus wanprestasi yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2002.

Pada tanggal 09 Oktober tahun 2003 seorang konsumen bernama Tuan Sobirin datang ke kantor PT. Para Multifinance Cabang Tegal untuk mengisi form permohonan pembiayaan. Konsumen tersebut membawa form awal dari dealer yang berisi type sepeda motor yang akan dibeli yaitu berupa satu unit kendaraan merk Kawasaki, besarnya uang muka dan angsuran yang sanggup dibayar.

¹⁴ *Ibid*

Setelah semua syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi oleh konsumen, yaitu :

- a. DP Murni > 10 % dari harga OTR, tidak termasuk angsuran 1, premi asuransi, dan biaya administrasi.
- b. Untuk Angsuran : minimal 35 % dari penghasilan (*fixed income*) tidak termasuk uang lembur, insentive ataupun bonus.
- c. Memiliki rumah sendiri (bukan kontrakan), jika pemohon masih tinggal bersama orang tua dan atau saudaranya maka orang tua atau saudaranya harus bertindak sebagai penjamin.
- d. Usia Pemohon adalah :
 - Usia Pemohon > 21 tahun (kecuali sudah menikah)
 - Usia Pemohon < 55 tahun untuk karyawan & Pegawai negeri
 - Usia Pemohon < 60 tahun untuk wiraswasta & guru
 - Usia Pemohon < 65 tahun untuk Guru besar
 - Usia Pemohon < 60 tahun tidak boleh menggunakan KTP
 - seumur hidup kecuali ada peraturan Pemda setempat.
- e. Domisili konsumen harus berada dalam wilayah kerja operasional yang bersangkutan.
- f. Surat-surat yang perlu dilampirkan yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kartu Keluarga
 - PBB / Rek. Listrik bulan terakhir
 - Slip gaji / Keterangan penghasilan

- g. Jika pemohon seorang duda atau janda harus ada surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang, apabila perceraian karena meninggal dunia maka harus ada akta kematian.

Pihak perusahaan memberikan persetujuan untuk memberikan pembiayaan kepada Tuan Sobirin setelah dari hasil survey dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan.

Pembiayaan yang disetujui oleh Kepala Cabang PT. Para Multifinance adalah sebesar Rp. 10,782,500,- dengan bunga Rp. 155.500,- sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 13.938.000,- dengan angsuran Rp. 606.000,- setiap tanggal 11 tiap bulannya dengan jangka waktu 23 bulan. Terhitung sejak tanggal 11 Oktober tahun 2002 berakhir 11 September 2004.

Pada awalnya pembayaran yang dilakukan oleh Tuan Sobirin berjalan dengan lancar, pada akhir tahun 2003 pembayarannya mengalami kemacetan 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2003. PT. Para Multifinance telah memberikan beberapa kali peringatan, akan tetapi Tuan Sobirin tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini maka PT. Para Multifinance akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menyita kendaraan milik Tuan Sobirin.

Dalam suatu kontrak perjanjian pembiayaan konsumen, banyak item yang apabila dilanggar terutama oleh konsumen, maka kontrak dianggap putus. Yang paling penting diantaranya tentu apabila konsumen tidak

membayar uang cicilan pada saat jatuh tempo, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan :

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.....

Mengenai perjanjian untuk melaksanakan pembayaran, jika dalam perjanjian telah ditetapkan batas waktu tetapi konsumennya belum juga melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan lewat maka pihak PT. Para Multifinance telah memberi surat tagih atau surat peringatan. Sebelum memberikan surat peringatan PT. Para Multifinance akan memberikan peringatan secara lisan melalui telepon dan apabila hal itu tidak di perhatikan oleh konsumen maka pihak perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan ke 1, ke 2 hingga surat ke 3.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan konsumen, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu :

"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" .

Yang dimaksud dengan surat perintah pada Pasal ini adalah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud akta sejenis oleh undang-undang adalah suatu peringatan tertulis, saat ini sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau tegoran dilakukan dengan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si konsumen supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat. Tetapi

ada baiknya juga dilakukan secara tertulis, agar nanti apabila sampai diperkarakan di pengadilan, pihak perusahaan memiliki bukti yang kuat dan konsumen tidak dapat memungkirinya.

Dalam hal penyitaan ini PT. Para Multifinance tidak melalui lembaga-lembaga hukum atau menggunakan bantuan dari jurusita pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR, yang menyatakan bahwa dimana sita terhadap suatu objek perjanjian seharusnya dilakukan melalui sita pengadilan, melainkan dengan cara penyitaan langsung terhadap kendaraan yang menjadi objek pembiayaan konsumen dimanapun kendaraan itu berada. PT. Para Multifinance Cabang Tegal memiliki alasan tersendiri mengenai hal ini, menurut Kepala Cabang PT. Para Multifinance mengapa hal itu tidak dilakukan sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR karena ada beberapa alasan yaitu :

- a. Mengenai sita yang dilakukan oleh PT. Para Multifinance telah termuat dalam kontrak perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Para Multifinance Cabang Tegal dengan pihak konsumen, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sub h yaitu yang menyatakan apabila konsumen tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian diberlakukan cidera janji , sehingga tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu perseroan berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk mengambil dimanapun benda itu berada.

b. Mengenai waktu dan biaya, apabila permasalahan ini harus dibawa ke pengadilan maka akan memakan waktu yang lama, karena harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu dan besarnya biaya yang harus di keluarkan. Mengingat biaya harus ditanggung oleh pihak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat 1 HIR bahwa pihak tentang biaya perkara sebagai sanksi bagi kreditur yang wanprestasi diwajibkan membayar biaya perkara. Pihak PT. Para Multifinance menganggap hal itu tidak mungkin dipenuhi oleh konsumen, karena jangankan untuk membayar biaya perkara untuk menyelesaikan pembayarannya saja Tuan Sobirin sudah tidak sanggup.

Selain itu ternyata didalam praktek tidak mudah melibatkan pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak dan ini merupakan konsekuensi yuridis dari Pasal 1266 KUHPerdara.

Dengan alasan yang disebutkan diatas Pihak PT. Para Multifinance kemudian mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini tidak melalui pengadilan akan tetapi cukup dengan klausa yang ada didalam isi kontrak perjanjian antara PT.Para Multifinance dengan Tuan Sobirin.

Setelah kendaraan berada ditangan PT.Para Multifinance, kendaraan tersebut kemudian oleh pihak perseroan dilelang atau dipindahtangankan pada pihak lain dan uang dari hasil penjualan atau pemindahtanganan digunakan untuk membayar pelunasan hutang beserta denda serta seluruh kewajiban konsumen, maka PT. Para Multifinance akan mengembalikan kepada konsumen sisa dari hasil pembayaran tersebut. Sebaliknya apabila

uang dari hasil penjualan atau pemindahtanganan itu tidak cukup untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban Tuan Sobirin Kepada PT. Para Multifinance maka Tuan Sobirin tetap berkewajiban membayar sisa hutangnya pada PT. Para Multifinance Cabang Tegal selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan pihak PT. Para Multifinance kepada Tuan Sobirin.

Menurut Ulistyanto, Kepala Cabang PT. Para Multifinance Cabang Tegal, untuk menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan karena hilangnya objek pembiayaan konsumen atau wanprestasi yang timbul dari macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, maka PT. Para Multifinance Cabang Tegal telah mengalihkan risikonya kepada Asuransi, yang mana Asuransi tersebut pembayarannya menjadi kewajiban si konsumen sendiri¹⁵.

Dalam perjanjian Pembiayaan konsumen yang memegang objek jaminan adalah pihak konsumen, sehingga konsumen memiliki tanggung jawab terhadap barang atau objek jaminan yang berada ditangannya.

Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab konsumen atau pemegang jaminan terhadap objek jaminan terdapat dalam Pasal 10 huruf d syarat-syarat perjanjian pembiayaan PT. Para Multifinance yaitu, konsumen wajib memelihara dan mengurus kendaraan tersebut secara baik-baik dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri sampai masa perjanjiannya berakhir. Penulis setuju dengan upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Para Multifinance Cabang Tegal, karena kelalaian

¹⁵ Ulistyanto, Wawancara Kepala Cabang PT. Para Multifinance Tegal, tanggal 5 Januari 2004

atau Wanprestasi akan mempunyai akibat-akibat yang begitu penting yaitu kerugian pada Pihak PT. Para Multifinance.

Akibat kerugian yang diakibatkan kelalaian konsumen maka konsumen wajib memberikan ganti rugi kepada PT. Para Multifinance seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yaitu :

"Si Berutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya".

Sedangkan apabila hilangnya barang atau musnahnya barang bukan karena kesalahan konsumen maka pihak asuransi sebagai penjamin resiko yang ditunjuk oleh PT. Para Multifinance Cabang Tegal akan memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Dalam penggantian kerugian konsumen diminta untuk menunggu lebih dahulu karena Pihak PT. Para Multifinance dan asuransi yang bekerjasama dengan kepolisian tetap berusaha untuk menemukan kendaraan yang hilang. Apabila dalam waktu satu bulan dan kendaraan belum juga ditemukan maka kepada konsumen diberikan ganti rugi sama dengan atau lebih dari 75 % dari harga kendaraan tersebut.

Penulis sependapat dengan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen dalam hal terjadi pencurian atau hilangnya objek jaminan ini, hanya saja hendaknya pihak konsumen harus berusaha lebih baik untuk menjaga dan memelihara objek jaminan seperti yang diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara mengenai kewajiban konsumen untuk menyerahkan

kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat perjanjian pembiayaan konsumen berakhir. Sehingga PT. Para Multifinance tidak dirugikan dan konsumen akan lebih dipercaya dan diberi kemudahan apabila dimasa yang akan datang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kendaraan di PT. Para Multifinance Cabang Tegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Konsumen merupakan suatu alternatif pembiayaan seperti halnya peminjaman uang lewat kredit bank atau cara pembiayaan lainnya. Tetapi dalam hal ini pemberi dana tidak meminjamkan uangnya kepada konsumen melainkan melalui pembelian barang yang nantinya apabila jangka waktu pembiayaan konsumen selesai maka konsumen memiliki barang tersebut.

Prosedur pemberian pembiayaan di perusahaan Pembiayaan konsumen adalah calon konsumen mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan pembiayaan yang berisi data-data konsumen, type sepeda motor yang dikehendaki, uang muka dan angsuran yang sanggup dibayar oleh konsumen. Waktu yang diperlukan dari pengajuan sampai permohonan disetujui memerlukan waktu kurang lebih dua hari, tergantung dari hasil survey ke alamat calon konsumen dan kelengkapan data-data calon konsumen.

Penyerahan barang modal dilakukan dengan Jaminan Fidusia dimana konsumen dianggap seolah-olah merupakan pemilik sementara

(pemilik "pro-tempore") atas objek dan hak kepemilikannya berada pada pihak pemberi biaya sampai konsumen melunasi hutangnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan yang dijadikan objek jaminan, maka pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen mempunyai tanggung jawab atas barang yang dijadikan objek jaminan.

Adapun tanggung jawab pihak Konsumen adalah :

- Memelihara dan mengurus kendaraan secara baik atas biaya sendiri dan apabila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah maka bagian itu termasuk dalam penyerahan fidusia kepada perusahaan.
- Dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas kendaraan kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan.

Sedangkan tanggung jawab pihak perusahaan / pemberi dana adalah mengawasi keberadaan kendaraan agar tetap berada ditangan konsumen sampai masa pembiayaan selesai.

2. Apabila terjadi masalah dimana kendaraan sudah tidak ada di tangan konsumen dalam artian digadaikan atau dijual maka pihak perusahaan akan mengajukan pelaporan penggelapan ke polsek terdekat. Setelah kendaraan berada ditangan polisi dan diambil kembali oleh pihak perusahaan langkah selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan

surat panggilan kepada konsumen, apabila tidak datang maka akan dilakukan pemanggilan ke 2 dan ke 3, dan bila konsumen tidak datang juga maka pihak perusahaan akan melakukan lelang terhadap kendaraan tersebut. Tetapi bila si konsumen datang maka akan dilakukan negosiasi ulang mengenai kelanjutan dari perjanjian tersebut.

Dalam hal terjadi Wanprestasi dengan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh konsumen dalam hal pembayaran maka pihak perusahaan akan menarik kendaraan dimanapun kendaraan itu berada tanpa melalui sita revindikasi atau sita melalui pengadilan.

Pihak perusahaan memiliki alasan mengapa sita terhadap barang yang dijadikan objek jaminan tidak melalui pengadilan karena dianggap memakan waktu lama dan harus mengeluarkan biaya yang banyak.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya Wanprestasi oleh pihak konsumen maka pihak perusahaan dalam memberikan pembiayaan hendaknya lebih berhati-hati, sehingga perusahaan tidak dirugikan.

Perusahaan harus lebih seksama dalam menganalisa calon konsumen, perusahaan yang diwakili oleh tim surveyor harus menanyakan dan meneliti dengan baik data-data calon konsumen baik itu mengenai identitas maupun bukti kepemilikan rumah dan kemampuan bayar konsumen dengan mensurvey langsung ke perusahaan atau tempat usaha calon konsumen.

Untuk konsumen yang masih tinggal dengan orang tua, sebaiknya diminta untuk membuat surat kuasa khusus bermaterai secukupnya dengan melampirkan copy kartu identitas masing-masing pihak dan ditandatangani oleh orang tua atau saudaranya yang menjadi penjamin serta membuat pernyataan bahwa apabila konsumen tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka si penjamin harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, A, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991)
- Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Fuady, Munir, Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- _____, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2001)
- Khairandy, Ridwan, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta : Pasca Sarjana FH UI, 2003)
- Masjoen Sofan, Sri Sudewi, Hukum Perutangan Bagian B, (Jogjakarta : Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada, 1980)
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Jogjakarta : Liberty, 1985)
- Muhammad, Abdulkadir, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1992)
- _____, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1990)
- _____, Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1990)
- Patrik, Purwahid, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Semarang : Sumur Bandung, 1981)
- _____, Asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1986)
- Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank, (Jakarta : IBI, 1993), hal.17

Soebekti, Aneka Perjanjian, cetakan ke 8, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989)

_____, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1979)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1984)

Soemitro, Rony Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Galia Indonesia, 1990)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1986)

Tjitrosudibio, R. Subekti , KUHPdt, (Jakarta: Pradya Paramita)

Wery, P.L., Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Nederland, (Jakarta : Percetakan Negara RI, 1990)

Makalah

Patrik Purwahid, Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat, Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, (Surabaya : 11 Desember 1993)

Satrio, J, Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, (Surabaya : 11 Desember 1993), hal. 1.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen